

ANALISIS PENGARUH RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2013 - 2017

Oskar Sada

Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan, STIE Port Numbay Jayapura

Abstract: This study aims to determine the results of the Effect of Regional Retribution, on Regional Original Income in Jayapura Regency in 2013 – 2017. So the results of this study obtained A value of 25,570 shows an intercept value which means that if the value of x is equal to zero, then the original income of the region is 25,570. A B value of 2.344 indicates the value of the regression coefficient which means that if regional levy receipts decrease by 1 percent, then local original revenue receipts will decrease by 25.579. And also some factors that affect the receipt of regional levies, namely, awareness factors and lack of socialization from the government.

Keywords: Local Original Revenue and Regional Retribution.

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil Pengaruh Retribusi Daerah, terhadap Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Jayapura pada tahun 2013 – 2017. Maka hasil penelitian ini diperoleh Nilai a sebesar 25,570 menunjukkan nilai intercept yang berarti bahwa jika nilai x sama dengan nol, maka pendapatan asli daerah adalah sebesar 25,570. nilai b sebesar 2,344 menunjukkan nilai koefisien regresi yang berarti bahwa jika penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 1 persen, maka penerimaan pendapatan asli daerah akan mengalami penurunan sebesar 25,579. Dan juga beberapa faktor yang berpengaruh pada penerimaan retribusi daerah yakni, Faktor kesadaran dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

Kata Kunci : *Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah.*

Pendahuluan

Pemerintah Kabupaten Jayapura berupaya untuk meningkatkan pungutan pajak dan Retribusi daerahnya melalui penetapan peraturan Daerah (Pemda) nomor 8 tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi tentang peraturan daerah (Perda) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten Jayapura sebagai landasan hukum untuk melakukan pungutan-pungutan di masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (Perda).

pemerintah daerah kabupaten Jayapura, telah menetapkan retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum serta retribusi perizinan tertentu, untuk meningkatkan pendapata asli daerah (PAD) .

Dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin prosedur umum perpajakan dan Retribusi Daerah. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai subsistem Pemerintah Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan Masyarakat sebagai Daerah Otonomi.

Untuk memenuhi semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun dana sebesar besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik pula.

Kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke

pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Salah satu problema yang dihadapi oleh sebagian Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia dewasa ini adalah berkisar pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Problema ini muncul karena adanya kecenderungan pikiran dari sebagian kalangan birokrat di Daerah yang menganggap bahwa parameter utama yang menentukan kemandirian suatu Daerah di era Otonomi adalah terletak pada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah.

Retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD diharapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan Otonomi daerah, Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus benar - benar menggali semaksimal mungkin potensi - potensi pendapatan di daerahnya. Sehingga, dalam pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan yakni dalam hal pembiayaan. Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. Sehingga Penulis Mengangkat Judul

tentang Analisis Pengaruh Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Jayapura.

Perumusan Masalah

1. Berapa besar pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jayapura:
2. Faktor- Faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan Retribusi daerah di Kabupaten Jayapura.

Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka perlu pembatasan masalah yang mana hanya melihat berapa besar pengaruh retribusi daerah dan faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Jayapura tahun 2013 – 2017.

Landasan Teori

Pengertian Retribusi

Retribusi adalah sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah daerah, bahkan ada beberapa daerah menjadikan retribusi sebagai sumber utama dari pendapatan daerahnya, berdasarkan undang-undang Nomor tahun 2004 yang perubahan dari undang-undang Nomor 32 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang pada intinya mekanisme evaluasi retribusi untuk daerah diatur dengan peraturan daerah masing-masing daerah yang bersangkutan.

Pengertian Retribusi Daerah

Undang undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Retribusi Daerah dan Ketentuan Umum Nomor 64 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Dalam Undang - undang No.18 tahun 1997 pasal 2 ayat 2 disebut dengan retribusi daerah tidak dimasukan pembayaran yang dipungut oleh daerah sebagai penyelenggara perusahaan atau usaha itu dianggap sebagai perusahaan. Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang diambil oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas umum, khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan sebuah lembaga atau daerah tersebut.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Abdul Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Abdul Halim (2007:96), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

- a) Pajak Daerah
 1. Pajak Provinsi
 2. Pajak Kabupaten/ Kota
- b.) Retribusi Daerah, terdiri dari:Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- c.) Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu:Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, denda, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

Hasil Analisis dan Pembahasan

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan pelaksanaan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD. Semakin besar kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, maka semakin ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Untuk itu sebelum penulis mengulas lebih dalam tentang topik ini, maka penulis sajikan lebih dahulu data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 – 2017 dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 1

Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun 2013 - 2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2013	32,516,471,560.00	39,905,208,396.00	122,723
2014	66,216,600,632.00	80,133,491,088.00	121,017
2015	76,901,687,650.00	74,130,385,458.00	96,396
2016	84,316,762,612.00	87,394,171,937.00	103,650
2017	101,749,224,700.00	96,961,324,536.00	95,294

Sumber Data : BAPENDA Kabupaten Jayapura, 2018

Dari tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 besarnya penerimaan pendapatan asli daerah selalu mengalami peningkatan dimana pada

tahun 2013 besarnya target Rp.32,516,471,560,00 dan realisasi nya sebesar Rp.39,905,208,396,00 Pada tahun 2014 besarnya target Rp.66,216,600,632,00 dan realisasi sebesar Rp.80,133,491,088,00. Pada tahun 2015 besarnya target Rp.76,901,687,650,00 dan realisasinya sebesar Rp.74,130,385,458,00. Tahun 2016 besarnya target Rp.84,316,762,612,00 dan realisasinya sebesar Rp.87,394,171,937,00. Dan pada tahun 2017 besarnya target Rp.101,749,224,700,00 dan realisasinya sebesar Rp.96,961,324,536,00

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu pendapatan yang diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan Daerah Kabupaten/ Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber – sumber kekayaan alam dengan menetapkan jenis retribusi yang ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah dan juga sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Untuk itu sebelum penulis mengulas lebih dalam tentang topik ini, maka penulis sajikan lebih dahulu data Target dan Realisasi Retribusi Daerah tahun 2013 – 2017 dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 2

Target Dan Realisasi Retribusi Daerah

Tahun 2013 - 2017

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2013	3,231,701,876.00	6,457,186,648.00	199.81
2014	18,128,288,591.00	20,556,692,293.00	113.40
2015	30,223,240,000.00	25,184,455,000.00	83.33
2016	29,082,879,462.00	25,885,531,550.00	89.01
2017	29,044,244,700.00	28,865,341,185.00	99.38

Sumber Data: BAPENDA Kabupaten Jayapura ,2018

Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 besarnya penerimaan retribusi daerah selalu mengalami peningkatan dimana pada tahun 2013 besarnya target Rp.3,231,701,87600 dan realisasinya sebesar Rp.6,457,186,684,00. Pada tahun 2014 besarnya target Rp. 18,128,288,591,00 dan realisasi sebesar Rp.20,556,692,293,00. Pada tahun 2015 besarnya target Rp.30,223,240,000,00 dan realisasinya sebesar Rp.25,184,455,000,00. Pada tahun 2016 besarnya target Rp.29,082,879,462,00 dan realisasi sebesar Rp.25,885,531,550,00. Pada tahun 2017 besarnya target Rp.29,044,244,700,00 dan realisasinya sebesar Rp.28,865,341,185,00.

1. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hal lain juga yang perlu dilihat agar pengelolaan pajak lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat

memberikan kontribusi yang lebih baik lagi dalam menjuang pembayaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah oleh sebab itu perlu juga mengetahui berapa besar kontribusi penerimaan Retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dimana

Pada tahun 2013 adalah:

$$\text{kontribusi (2013)} = \text{Rp} . \frac{6.457.186.648,00}{39.905.208.396,00} \times 100 \% = 16,18\%$$

Pada tahun 2014 adalah

$$\text{Kontribusi (2014)} = \frac{\text{Rp.} 56.495.609.390,00}{74.130.385.458,75} \times 100\% = 0,10\%$$

Pada tahun 2015 adalah

$$\text{Kontribusi (2015)} = \frac{\text{Rp.} 25.184.455.000,00}{74.130.385.458,75} \times 100\% = 33,47\%$$

Pada tahun 2016 adalah

$$\text{Kontribusi (2016)} = \frac{\text{Rp} . 25.885.531.550,00}{58.776.419.161,13} \times 100\% = 44,04\%$$

Pada tahun 2017 adalah

$$\text{Kontribusi (2017)} = \frac{\text{Rp.} 28.865.341.185,00}{96.961.324.536,63} \times 100\% = 29,76\%$$

Dengan demikian kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah lebih jelas nya dapat di lihat pada tabel 4.4 dibawa ini.

Tabel 3

Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2013 - 2017

Tahun	Retribusi Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2013	6,457,186,648.00	39,905,208,396.00	0.16
2014	20,556,692,293.00	80,133,491,088.00	25.65
2015	25,184,455,000.00	74,130,385,458.00	33.97
2016	25,885,531,550.00	87,394,171,937.00	29.62
2017	28,865,341,185.00	96,961,324,536.00	29.77

Sumber Data: BAPENDA Kabupaten Jayapura ,2018 (Data Diolah)

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa tingkat kontribusi paling besar dari retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah yaitu pada tahun 2015 mencapai 33,97% sedangkan kontribusi yang paling kecil pada tahun 2013 mencapai 0,16%. Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar

retribusi dan masih kurang nya tenaga pemugutan pajak yang berkualitas.

Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Retribusi Daerah

Untuk mengetahui perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah dan juga retribusi daerah, maka penulis sajikan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

Tabel 4

Perkembangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dan Retribusi Daerah

Tahun 2013 - 2017

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	%	Retribusi Daerah (Rp)	%
2013	39,905,208,396.00	-	6,457,186,648.00	-
2014	80,133,491,088.00	2,008	20,556,692,293.00	3.184
2015	74,130,385,458.00	0,925	25,184,455,000.00	1.225
2016	87,394,171,937.00	1,179	25,885,531,550.00	1.028
2017	96,961,324,536.00	1,109	28,865,341,185.00	1.115

Sumber Data: BAPENDA Kabupaten Jayapura, 2018 (Data Diolah)

Dari tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 perkembangan penerimaan pendapatan asli daerah dan juga retribusi daerah mengalami *fuktuasi* (naik/turun), dimana perkembangan pendapatan asli daerah tertinggi pada tahun 2014 sebesar Rp.80,133,491,088,00 atau 2,008% dan terendah pada tahun 2015 sebesar Rp.74,130,385,458,00 atau 0,925%. Sedangkan perkembangan retribusi daerah tertinggi pada tahun 2014 sebesar Rp.20,556,692,293,00 atau 3,184% dan terendah pada tahun 2016 sebesar Rp.25,885,531,550,00 atau 1,028%.

Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka digunakan perhitungan Regresi Linier Sederhana dan hasil yang diperoleh dapat terlihat pada tabel 4.4 dibawah ini:

Table 5 Hasil Regresi Linier Sederhana

Hasil Perhitungan Regresi Linier Sederhana	
a (constant)	25,570
B	2,344
R	0,955
R ²	0,912

Sumber : Data Diolah

Dengan Demikian, maka fungsi regresi linier sederhana dapat diformulasikan sebagai berikut: $Y = 25,570 + 1,007x$, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Nilai a sebesar 25,570 menunjukkan nilai intercept yang berarti bahwa jika nilai x sama dengan nol, maka pendapatan asli daerah adalah sebesar 25,570.
- nilai b sebesar 2,344 menunjukkan nilai koefisien regresi yang berarti bahwa jika penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 1 persen, maka

penerimaan pendapatan asli daerah akan mengalami penurunan sebesar 25,579.

- Nilai Koefisien Korelasi (r) yang diperoleh adalah sebesar 0,955 atau 95,5 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah.
- Nilai Koefisien Determinan (r^2) yang diperoleh sebesar 0,912 atau 91,2 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah diperoleh dari penerimaan retribusi daerah.

Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah.

- Belum adanya kesadaran wajib pajak dalam sistem pembayaran yang di sektor pada pihak pengelolaan yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jayapura.
- Kurangnya sosialisasi dari pemerintah, dalam hal ini instansi – instansi terkait kepada masyarakat. Perlu ada sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memperoleh informasi mengenai retribusi daerah dan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat yang tinggi dalam membayar retribusi.

Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pembahasan yang di uraikan penulis pada bab terdahulu, maka pada bagian ini penulis akan mencoba untuk menyimpulkan sesuai dengan data hasil penelitian sebagai berikut:

- Nilai Koefisien Korelasi (r) yang diperoleh adalah sebesar 0,955 atau 95,5 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah di Kabupaten Jayapura. Nilai Koefisien Determinan (r^2)

yang diperoleh sebesar 0,912 atau 91,2 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah diperoleh dari penerimaan retribusi daerah.

2. Faktor- faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah adalah kesadaran dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlu adanya kegiatan prioritas kepada masyarakat dalam menunjang rencana penetapan target yang tinggi sehingga pemberdayaan potensi retribusi daerah dilakukan secara optimal dan sejalan dengan peningkatan pendapatan asli daerah setiap tahunnya seperti peningkatan sumberdaya aparatur atau para pegawai.
2. Perlu dilakukannya sosialisasi secara rutin kepada seluruh lapisan masyarakat yang dilaksanakan secara terkoordinasi oleh badan peneliti dan pengembangan daerah Kabupaten Jayapura.
3. Bagi pemerintah Kabupaten Jayapura perlu juga memperhatikan kebijakan – kebijakan supaya peran dan fungsi pemerinta dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat yang baik.

Daftar Pustaka

- Azis, 1996, *Analisis Tentang Penerimaan Retribusi Daerah terhadap PAD di Kotamadya Bandar Lampung*.
- Fattah, Ardin, 2013, *Retribusi Daerah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan*, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.
- Hayani, 2001, *Analisis Pemungutan Retribusi Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendanaan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan*.
- Indra, dkk, 2012. *Analisis Implementasi Kebijakan Retribusi Daerah pada Kota Makassar*.
- Jatmiko, Kurniawan Dwi, 2009, *Peranan Penerimaan Retribusi Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta*,
- Kaho, Nasrun, 1997, *Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare*.
- Marihot P. Siahaan, 2005, Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Munawir, 1990, Pokok-Pokok Perpajakan Yogyakarta dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 17 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perparkiran pada Kota Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001. Tentang Retribusi Daerah pada Setiap Kota di Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2012. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berupaya untuk meningkatkan pungutan pajak dan

retribusi daerahnya melalui penetapan Peraturan Daerah di Kabupaten Jayapura.

- Siahaan, Safawi.2005.*Analisis tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ibukota Yogyakarta*;Siahaan
- Sugiarti, 2006, *Potensi Retribusi Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Kota Kediri*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Sutikno.2008 “*Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dikota Bogor Linguistik Indonesia*.”
- Tati,Dispenda. 2013-2017. *Data penelitian “Analisis pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura*.